BAB II

LANDASAN TEORI

A. Desa Wisata

1. Pengertian Desa Wisata

Menurut Nuryanti, Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yan menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Sedangkan menurut Joshi, Desa wisata (*rural tourism*) merupakan pariwisata yang terdiri dari keseluruhan pengalaman pedesaan, atraksi alam, tradisi, unsur-unsur unik yang secara keseluruhan dapat menarik minat wisatawan.[12]

Mengutip dari pendapat Subagyo, jika dilihat dari perspektif kehidupan masyarakatnya, pariwisata pedesaan atau desa wisata merupakan suatu bentuk wisata dengan objek dan daya tarik berupa kehidupan desa yang memiliki ciri-ciri khusus dalam masyarakatnya, panorama alam dan budayanya, sehingga mempunyai peluang untuk dijadikan komoditi bagi wisatawan khususnya wisatawan asing. Kehidupan desa sebagai tujuan wisata adalah desa sebagai objek sekaligus juga sebagai subjek dari kepariwisataan yaitu sebagai pihak penyelenggara sendiri dari berbagai aktivitas kewisataan dan hasilnya akan dinikmati oleh masyarakat secara langsung. Oleh karena itu peran aktif masyarakat sangat menentukan kelangsungan kegiataan desa ini.

---

[12]Made Antara dan I Nyoman Sukma Arida, *Panduan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Lokal* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2015), 7.

Keberhasilan wisata desa atau desa wisata sangat dipengaruhi oleh intensitas kegiatan, lokasinya, manajemen dan dukungan dari masyarakat lokal dan harus sesuai dengan keinginan masyarakat lokal dan tidak direncanakan secara sepihak. Mendapat dukungan dari masyarakat setempat bukan hanya dari individu atau suatu kelompok tertentu. Inisiatif menggerakkan modal usaha, profesionalisme pemasara, citra yang jelas harus dikembangkan karena keinginan wisatawan adalah mencari hal yang spesial dan produk yang menarik. [13]

2. Tipe Desa Wisata

Menurut pola, proses dan tipe pengelolaanya, desa atau kampung wisata di Indonesia terbagi dalam dua tipe yaitu tipe terstruktur dan tipe terbuka.

a. Tipe terstruktur/daerah kantong (*enclave*), tipe ini ditandai dengan :
    1) Lahan wisata yang dilengkapi dengan infrastruktur yang spesifik untuk kawasan tersebut. Tipe ini memiliki kelebihan dalam citra yang ditumbuhkannya, sehingga mampu menembus pasar Internasional
    2) Lokasi pada umumnya terpisah dari masyarakat atau penduduk lokal, sehingga dampak negatif yang ditimbulkannya dapat lebih diminimalisir. Selain itu pencemaran sosial budaya yang ditimbulkan akan terdeteksi sejak dini

[13]Ibid., 18.

3) Lahan tidak terlalu besar dan masih dalam tingkat kemampuan perencanaan yang integratif dan terkoordinasi. Sehingga diharapkan akan tampil menjadi semacam agen untuk mendapatkan dana-dana internasional sebagai unsur utama untuk menangkap servis-servis dari hotel berbintang.

b. Tipe terbuka (*spontaneous*), tipe ini ditandai dengan karakter-karakter yaitu tumbuh-menyatunya kawasan dengan struktur kehidupan, baik ruang maupun pola dengan masyarakat lokal. Distribusi pendapatan yang didapat dari para wisatawan, dapat langsung dinikmati oleh penduduk lokal. Akan tetapi dampak negatifnya yaitu cepat menjalar menjadi satu ke dalam penduduk lokal, sehingga lebih sulit dikendalikan.[14]

Tolak ukur pembangunan atau pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan sebagai dasar terbantuknya desa wisata ini adalah dengan terciptanya hubungan yang harmonis antara masyarakat lokal, sumber daya alam/budaya, dan wisatawan. Hal ini dapat dilihat dari :

a. Adanya peningkatan antusiasme pembangunan masyarakat melalui pembentukan suatu wadah organisasi untuk menampung segala bentuk aspirasi masyarakat, melalui sistem kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat lokal.

b. Adanya keberlanjutan lingkungan fisik yang ada di masyarakat. caranya adalah melalui konservasi, promosi dan menciptakan tujuan

[14]Ibid., 10.

hidup yang harmonis antara sumber daya alam, sumber daya budaya, dan sumber daya manusia. Serta menemukan kembali potensi-potensi sumber daya tersebut.

c. Adanya keberlanjutan ekonomi melalui pemerataan dan keadilan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.
d. Membangun sistem yang menguntungkan masyarakat seperti sistem informasi yang dapat digunakan bersama-sama.
e. Menjaga kepuasan wisatawan melalui pelayanan yang lebih baik, pengadaan informasi yang efektif, efisien, tepat guna serta mengutamakan kenyamanan bagi wisatawan.

Kemudian hubungan antara komponen pembangunan pariwisata berbasis kerakyatan seperti yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disajikan ke dalam gambar berikut :

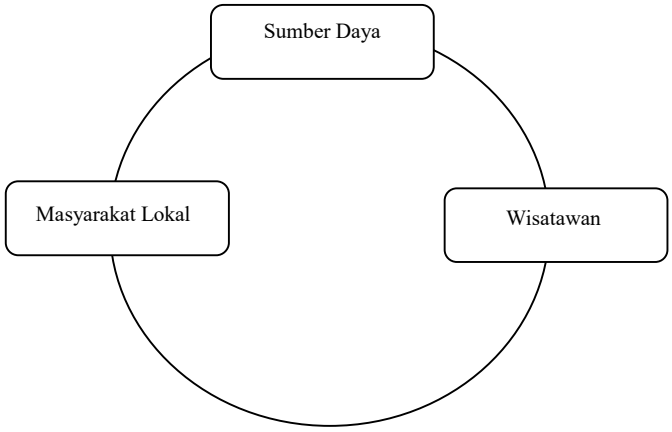

Gambar 2.1 Pembagunan Pariwisata Berbasis Kerakyatan

Bentuk-bentuk pengembangan desa wisata ini dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu :

a. Swadaya (sepenuhnya dari masyarakat)

b. Kemitraan (melalui pengusaha besar/kecil)

c. Dan pendampingan oleh LSM atau pihak perguruan tinggi selama masyarakat dianggap belum mampu mandiri, namun jika sudah dianggap mampu mandiri maka pelan-pelan ditinggalkan oleh pendamping.[15]

3. Pengembangan dan Pengelolaan Desa Wisata

a. Komponen Produk Desa wisata

Menurut Cooper, destinasi wisata harus memiliki empat aspek utama (4A) yaitu *Attracktion* (Daya tarik), *Accessibility* (Keterjangkauan), *Amenity* (fasilitas pendukung), dan *Ancilliary* (organisasi / kelembagaan pendukung)

1) *Attracktion* (Daya tarik) yaitu produk utama sebuah destinasi yang berkaitan dengan apa yang bisa dilihat dan dilakukan oleh wisatawan di desa wisata tersebut. Atraksi bisa berupa keindahan alam, budaya masyarakat setempat, sarana permainan dan sebagainya.

2) *Accessibility* (Keterjangkauan) adalah sarana dan infrastruktur untuk menuju ke desa wisata berupa akses jalan raya, ketersediaan sarana transportasi dan rambu-rambu petunjuk jalan.

[15] Ibid.,16.

3) *Amenity* (fasilitas pendukung) yaitu segala fasilitas pendukung yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada di destinasi. Amenitas ini berkaitan dengan ketersediaan sarana akomodasi untuk menginap serta restoran atau warung untuk makan dan minum di lokasi destinasi desa wisata.
4) *Ancilliary* (organisasi/kelembagaan pendukung) yakni berkaitan dengan ketersediaan sebuah organisasi atau orang-orang yang mengurus desa wisata tersebut.

b. Kriteria Desa wisata

Suatu desa akan dapat menjadi sebuah desa wisata jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

1) Atraksi wisata, yaitu semua yang mencakup alam, budaya dan hasil ciptaan manusia.
2) Jarak tempuh, yaitu jarak tempuh dari kawasan wisata terutama tempat tinggal wisatawan dan juga jarak tempuh dari ibukota provinsi serta ibukota kabupaten.
3) Besaran Desa, menyangkut jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa. Kriteria ini berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu desa.
4) Sistem kepercayaan dan kemasyarakatan, merupakan aspek penting mengingat adanya aturan-aturan yang khusus pada komunitas sebuah desa, yang perlu dipertimbangkan adalah

agama yang menjadi mayoritas dan sistem kemasyarakatan yang ada.

5) Ketersediaan infrastruktur, meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, jaringan telepon dan sebagainya.

c. Pendekatan Pengembangan desa wisata

Dalam upaya pengembangan desa wisata dapat dilakukan melalui dua pendekatan yakni pendekatan pasar dan fisik.

1) Pendekatan pasar, yakni pendekatan dengan cara interaksi antara wisatawan dengan masyarakat baik secara langsung, setengah langsung da tidak langsung.
2) Pendekatan fisik, yakni merupakan salah satu solusi umum dlaam mengembangakna sebuah desa melalui sektor pariwisata dengan menggunakan standar-standar khusus seperti pemanfaatan rumah kuno, tradisi khas, tari-tari adat dan sebaginya.

d. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa

Merupakan salah satu aspek yang sangat penting karena mengingat desa wisata adalah desa dibidang pariwisata yang dalam pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat dan hasil yang diperolehnya juga diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

e. Pengemasan

Komponen pokok yang perlu diperhatikan dalam proses pengemasan desa wisata ke dalam paket-paket wisata antara lain akomodasi, transportasi makanan, guide, objek, dan lain-lain.

f. Menciptakan Branding

Menurut Kotler merk (brand) adalah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa atau kelompok penjual dan untuk membedakannya dari para pesaing. Buck dan Law dalam Pitana dan Gayatri memandang bahwa pariwisata adalah industri yang berbasiskan citra, karena citra mampu membawa calon wisatawan ke dunia simbol dan makna. Bahkan beberapa ahli pariwisata mengatakan bahwa citra ini memegang peranan yang penting daripada sumber pariwisata yang kasat mata.

g. Pemasaran Online

Menurut Supriyadi, pemasaran online terbukti telah memberikan banyak manfaat yang tidak tersedia dalam pemasaran offline. Diantaranya[16] :

1) Dapat melakukan perubahan dengan cepat
2) Dapat menelusuri hasil secara *real time*
3) Dapat menargetkan demografis tertentu dalam iklan yang dibuat
4) Banyak pilihan, dan Kemampuan konversi instan

[16]Ibid.,25-36

Pengembangan desa wisata ini seyogyanya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Upaya ini perlu memerlukan kesabaran dalam melakukan pengkajian, perencanaan, pengembangan, dan pemanfaatan secara wajar dan adil baik terhadap alam maupun manusianya. Selain itu harus pula memiliki kemitraan yang kuat dan dukungan dari dalam maupun luar masyarakat dan konservasi lingkungan yang tidak boleh diabaikan karena desa wisata ini sangat berperan penting dalam upaya mengurangi angka kemiskinan.

B. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat merupakanbentuk dari pembangunan yang berpusat pada manusia dan direncanakan sesuai dengan potensi, masalah, serta kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan ditujukan agar masyarakat mampu berdaya, dan memiliki daya saing menuju kemandirian.[17]

Secara lebih rinci menurut Slamet, yang dikutip dalam buku Pemberdayaan Masyarakat di Era Global Karya Oos M. Anwar menekankan bahwa hakikat pemberdayaan adalah tentang bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu di sini mengandung makna : berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu sebagai

[17] Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global* (Bandung: Alfbeta, 2013),48.

altenatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi serta mampu bertindak sesuai inisiatif. Sedangkan indikator pemberdayaan menurut Suharto, paling tidak memiliki empat hal, yaitu merupakan kegiatan yang terencana dan kolektif, memperbaiki kehidupan masyarakat, prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung, serta dilakukan melalui program peningkatan kapasitas.

Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan memiliki makna dorongan atau motivasi, bimbingan atau pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu mandiri. Upaya tersebut merupakan sebuah tahapan dari proses pemberdayaan dalam mengubah perilaku, mengubah kebiasaan lama menuju perilaku baru yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya.[18]

2. Upaya dan Bentuk Pemberdayaan

Selain ditujukan untuk mengubahperilaku masyarakat agar mampu berdaya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan, pemberdayaan juga menekanakan pada proses, bukan semata-mata hasil *(output)* dari proses tersebut. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan pemberdayaan adalah seberapa besar partisipasi atau keberdayaan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat. semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam proses tersebut, berarti semakin berhasil kegiatan pemberdayaan.

[18]Ibid., 49.

Pemberdayaan dalam menuntaskan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara mengubah *mind set* individu dan masyarakat untuk berdaya dan mandiri. Pemberdayaan juga dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas yang dapat meningkatkan partisipasi individu dan masyarakat. bentuk aktivitas pemberdayaan tersebut diataranya: kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dapat mendorong kemampuan dan ketrampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, menciptakan berbagai kesempatan kerja, menghidupkan kembal budaya dan kearifan lokal sebagai modal sosial, dan bentuk aktivitas lainnya.

Melalui kegiatan pemberdayaan, individu dan masyarakat disadarkan akan potensi, kebutuhan, dan masalah yang ada pada diri dan lingkungannya. Selanjutnya mereka didorong untuk mau melakukan perubahan yang dimulai dari dalam dirinya.

3. Ciri-Ciri Pemberdayaan

Menurut Moeljarto pemberdayaan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

a. Prakarsa dan proses pengambiilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatharus diletakkan pada masyarakat sendiri
b. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasikan sumber-sumber yang ada untuk mencapai kebutuhannya
c. Mentolerir variasi local sehingga amat fleksibel dan menyesuaikan diri dengan kondisi lokal
d. Menekankan pada *social learning*

e. Proses pembentukan jaringan antara birokrasi dan lembaga swadaya masyarakat, satuan-satuan organisasi tradisional yang mandiri[19]

4. Strategi Pemberdayaan

Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan. Menurut Suharto, penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu : Pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Pemungkinan, penciptan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekarat-sekarat kultural dan struktural yang menghambat

b. Penguatan, memperluat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

c. Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya

[19]Moeljarto, *Politik Pembangunan Sebuah Analisis, Konsep Arah dan Strategi* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995), 44.

eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

d. Penyokongan, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya.

e. Pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. [20]

C. Ekonomi Kerakyatan

1. Pengertian Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi Kerakyatan menurut Umar Juoro adalah sistem ekonomi yang mencakup konsep, kebijaksanaandan strategi pengembangan dengan rakyat sebagai pelaku perekonomian baik dalam bentuk koperasi, usaha menengah, usaha kecil maupun usaha gurem.[21]

Sedangkan ekonomi kerakyatan menurut Zulkarnain, di dalam bukunya yang berjudul: Kewirausahaan (Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan penduduk Miskin), ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang harus di anut sesuai dengan falsafah negara kita

[20] Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat,* 88.
[21] PINBUK, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistim Syari'ah; Perjalanan Gagasan dan Gerakan BMT di Indonesia* (Kalibata: CV. Alfa Grafika, 2000), 51.

yang menyangkut dua aspek, yakni keadilan dan demokrasi ekonomi, serta keberpihakan kepada ekonomi rakyat.[22]

Hal diatas senada dengan ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan ketentuan pasal 33 UUD 1945. Kata kerakyatan tercantum pada bunyi sila ke-4 Pancasila yaitu "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan", yang artinya tidak lain adalah demokrasi menurut Indonesia. Maka ekonomi kerakyatan adalah (sistem) ekonomi yang demokratis. Pengertian demokrasi ekonomi atau (sistem) ekonomi yang demokratis termuat lengkap dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut:[23]

a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai olehnegara;
c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuranrakyat;
d. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan Iingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi

[22]Zulkarnain, *Kewiausahaan; Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Penduduk Miskin* (Yogyakarta: Adicipta Karya Nusa, 2006), 98.
[23] Kuntana Magnar, Inna Junaenah, dan Giri Ahmad Taufk, "Tafsir MK Atas Pasal 33 UUd 1945 (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002)", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010, 113.

nasional;dan

Jika kita memahami konteks dari poin-poin diatas, maka penjelasan tersebut sama dengan ide ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ekonomi kerakyatan adalah perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan yang berkaitan erat dengan aspek keadilan, demokrasi ekonomi, keberpihakan pada ekonomi rakyat yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil dan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan, serta berperilaku adil bagi seluruh masyarakat, dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan atau mayoritas masyarakat

2. Ciri-Ciri Ekonomi Kerakyatan

Menurut Soeharto Prawiro Kusumo, mengemukakan beberapa ciri dan prinsip yang terdapat dalam konsep demokrasi ekonomi/ekonomi kerakyatan. Adapun Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut :[24]

a. Tingkat kemandirian yang tinggi
b. Adanya kepercayaan diri dan kesetaraan
c. Kesempatan kerja yang luas
d. Masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi
e. Persaingan yang sehat

[24] Soeharto Prawirokusumo, *Ekonomi Rakyat; Konsep, Kebijakan, dan Strategi* (Yogyakarta: BPFE, 2001), 4.

f. Keterbukaan/demokrasi

g. Pemerataan yang berkeadilan

h. Didukung dengan industri berbasis SDA

Adapun tujuan pengembangan ekonomi masyarakat adalah untuk mengangkat kelompok rakyat miskin menjadi golongan berpendapatan menengah (*midle income*), sehingga nantinya sebagian besar masyarakat Indonesia masuk ke dalam kelompok *middle income* dan sebagian kecil misalnya 10% atau lebih kecil merupakan masyarakat miskin yang dikarenakan kondisi alamiahnya. [25]

3. Indikator Keberhasilan Ekonomi Kerakyatan

Menurut Rizal Ramli bahwa indikator untuk mengukur keberhasilan ekonomi kerakyatan adalah indeks pembangunan manusia yang terdiri dari:[26]

a. Status gizi

b. Status kesehatan yang terlihat dari angka harapan hidup

c. Status pendidikan, pekerjaan yang mencukupi kebutuhan hidup, dan;

d. *Prevalensi* kejadian penyakit dan lain-lain, yang harus diukur secara kuantitatif. Itulah sebetulnya ukuran kesejahteraan rakyat yang paling penting, bukan pertumbuhan ekonomi atau nilai tukar.

Adapun indikator untuk mengukur keberhasilan dalam ekonomi Islamyaitu melalui tingkat kesejahteraan menurut Islam seperti yang

[25]PINBUK, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan,* 51.
[26]Mubyarto, "Ekonomi Rakyat dan Reformasi Kebijakan"*Junal Ekonomi Rakyat,* Vol 3 No.6 (2004),12.

disebutkan dalam Al- Quran surat Al-Quraisy ayat 3-4 yang berbunyi:

فَلۡيَعۡبُدُواْ رَبَّ هَٰذَا ٱلۡبَيۡتِ ٣ ٱلَّذِيٓ أَطۡعَمَهُم مِّن
جُوعٖ وَءَامَنَهُم مِّنۡ خَوۡفِۢ ٤

Artinya : "Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan."

Ayat di atas menunjukkan bahwa terdapat tiga indikator utama dalam mengukur kesejahteraan yaitu:

a. Pertama, Menyembah Kepada Allah. menjelaskan bahwa tauhid merupakan pondasi awal dalam meningkatkan kesejahetaraan sebelum terpenuhinya kesejahteraan yang bersifat materiil. Indikator ini menekankan pada kita untuk menjadikan Allah SWT sebagai pengayom, pelindung dan pemberi rizki bagi kita yang mana terbingkaidalambentukibadah.
b. Kedua, Tercukupinya Konsumsi. indikatorinimenjelaskanpadakita bahwa segala rizki yang diberikan kepada kita bersumber dari Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kita.
c. Ketiga, Timbulnya Rasa Keamanan. indikator ini menjelaskan suasana aman, tentram dan nyaman merupakan bagian dari sejahtera atau tidaknya suatu masyarakat. Jika kejahatan masih terjadi di suatu

masyarakat, maka hal ini mengindikasikan belum sejahteranya suatu masyarakat karena belum terpenuhinya hak dan mementingkan kepentingan pribadi.[27]

Sedangkan menurut Umer Chapra, keberhasilan ekonomi Islam berimplikasi pada 4 hal yaitu:[28]

a. Pemenuhan kebutuhan pokok. Para *fuqaha s*epakat bahwa fardhu kifayah hukumnya bagi masyarakat muslim untuk memperhatikan kebutuhan pokok orang-orang miskin. dalam pemenuhin kebutuhan dasar terdapat batasan tidak sampai pada tahap pemborosan dan kesombongan yang dilarang oleh Islam.
b. Sumber- sumber pendapatan yang terhormat. Beliau menjelaskan bahwa kewajiban kolektif masyarakat muslim adalah menjamin peluang yang sama bagi setiap orang untuk memperoleh penghasilan dan penghidupan yang terhormat sesuai dengan kemampuan dan usahanya. Pada akhirnya mereka mampu secara mandiri meningkat kemampuannya dalam mendapatkan penghasilan.
c. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. beliau menjelaskan bahwa kesenjangan dalam masyarakat muslim diakui sepanjang penyebabnya adalah peerbedaan dalam ketrampilan, inisiatif, usaha dan resiko. Adapun dalam Islam melarang kesenjangan yang disebabkan oleh penguasaan sumber daya yang terkonsentrasi pada segelintir orang.

[27] M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur'an Juz Amma, Vol XV,* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 541.
[28] Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi (*Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 215.

d. Pertumbuhan dan stabilitasekonomi.

Berdasarkan pendapat di atas, maka peneliti menganggap bahwa secara garis besar terdapat kesamaan antara ekonomi kerakyatan dan ekonomi Islam meskipun dengan istilah yang berbeda. Di lain hal, dalam ekonomi Islam lebih berisfat umum seperti indikator terpenuhinya konsumsi yang bisa mencakup pada status pendidikan, pekerjaan dan gizi. Juga indikator keamanan yang bisa mencakup pada tingkat kesehatan dan penyakit. Hal yang membedakan terletak pada unsur ketauhidan yang tidak ada pada indikator keberhasilan ekonomi kerakyatan. Menurut peneliti hal ini bisa disebabkan perbedaan dari sejarah yang melatarbelakangi terbentuknya kedua sistem ekonomi tersebut.